

ANALISIS PENGARUH TAFSIR POLITIK TERHADAP AGAMA SEBAGAI ALAT KEKUASAAN

Owen Kosasi; Dzaki Faishal Hidayat; Universitas Pradita,
owen.kosasih@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: This research discusses the relationship between political and religious interpretations in the Indonesian socio-political context, highlighting how religion is often used as a tool to legitimize power. Through a qualitative, desk-based approach, this research examines the events of the 1965 September 30 Movement by the PKI and the 212 Action as two key examples of the utilization of religious interpretations in politics. The PKI, with its Marxist ideology that contradicts Islamic teachings, was rejected by organizations such as Muhammadiyah, which affirms the importance of private property and the value of amar ma'ruf nahi munkar. Meanwhile, Aksi 212 shows how interpretations of Qur'anic verses are used to herd mass opinion in the context of political seats. The results emphasize the importance of moderate ideological and religious education to prevent the misuse of religious interpretations for political interests.

Keywords: Political Interpretation, Religion and power, September 30th Movement, Action 212.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas hubungan antara tafsir politik dan agama dalam konteks sosial-politik Indonesia, dengan menyoroti bagaimana agama kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI dan Aksi 212 sebagai dua contoh utama pemanfaatan tafsir agama dalam politik. PKI dengan ideologi Marxisme yang bertentangan dengan ajaran Islam ditolak oleh organisasi seperti Muhammadiyah, yang menegaskan pentingnya kepemilikan pribadi dan nilai amar ma'ruf nahi munkar. Sementara itu, Aksi 212 menunjukkan bagaimana tafsir ayat Al-Qur'an digunakan untuk menggiring opini massa dalam konteks kursi politik. Hasil penelitian menekankan pentingnya pendidikan ideologis dan keagamaan yang moderat untuk mencegah penyalahgunaan tafsir agama demi kepentingan politik.

Kata Kunci: Tafsir Politik, Agama dan kekuasaan, G 30 S PKI, Aksi 212.

I. PENDAHULUAN

Kata tafsir adalah sesuatu yang menjelaskan dan menerangkan dalam bentuk komunikasi secara lisan maupun gerakan, antara dua pembicara atau lebih. Tafsir politik merupakan hubungan antar manusia yang senantiasa selalu berada di ruang lingkup masyarakat atau kelompok. Tafsir beragama merupakan pengikat berbagai komunitas sosial akibat perbedaan suku bangsa, letak geografis, etnis, dan kelas sosial. Analisis ini muncul dari pengamatan terhadap fenomena sejarah dan kontemporer dimana agama dengan tafsir-tafsirnya, sering kali digunakan untuk membenarkan, mengukuhkan, atau bahkan merebut kekuasaan politik. Meskipun agama dan politik pada dasarnya memiliki lingkup yang berbeda, keduanya sering kali berinteraksi satu sama lain dan berdampak pada bagaimana suatu negara berkembang. Penggunaan agama dalam politik, yang sering disebut sebagai "tafsir politik", telah menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari, terutama dalam kasus di mana tafsir tersebut digunakan untuk mendukung kekuasaan politik atau membentuk opini publik.

Untuk memahami suatu kondisi politik di Indonesia menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Studi kasus ini menyelidiki kekuasaan atau kepemimpinan berdasarkan elemen sosial yang sering kali menjadikan landasan keagamaan. Dengan terjadinya peristiwa seperti G30S 1965, reuni gerakan 212 dan PKI sebagai contoh dari adanya kekuasaan yang mendasarkan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Dinamika yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana penguasa menggunakan agama untuk memperkuat legitimasi politik mereka melalui interpretasi yang dipolitisasi. Sebagian besar diskusi ini dipicu oleh peristiwa politik modern di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana gerakan politik Islam menjadi

lebih kuat dan negara-negara demokratis dengan identitas Islam yang kuat muncul (Nabila et al. #). Di sinilah teori keseimbangan kekuasaan muncul, yang masih digunakan di Indonesia. Dalam Trias Politica, kekuasaan dibagi menjadi legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya) (Eni et al. #).

Dalam konteks sejarah dan sosial-politik Indonesia, hubungan antara agama dan politik telah menjadi wacana yang sangat dinamis dan kompleks. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, agama tidak hanya menjadi identitas spiritual masyarakat, tetapi juga alat mobilisasi massa, pembentuk opini publik, serta instrumen legitimasi kekuasaan. Penggunaan tafsir agama dalam arena politik sering kali tidak netral; ia bisa digunakan untuk memperkuat narasi dominan, mengikis oposisi, atau bahkan melanggengkan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir agama tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga sarat dengan muatan ideologis dan kepentingan.

Di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, agama memiliki posisi yang strategis dalam struktur sosial dan politik. Pemerintah dan elite politik sering kali memanfaatkan simbol-simbol dan wacana keagamaan untuk meraih simpati publik. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai peristiwa politik, seperti pemilihan umum, pembentukan kebijakan, hingga penanganan konflik sosial. Interpretasi agama yang digunakan dalam politik tidak jarang bersifat selektif dan manipulatif, bergantung pada kepentingan kekuasaan saat itu.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tafsir politik terhadap agama dibentuk, disebarluaskan, dan digunakan dalam konteks kekuasaan. Pemahaman ini akan membantu mengurai benang kusut antara agama dan politik, serta membuka ruang diskusi kritis mengenai demokrasi, pluralisme, dan keadilan dalam masyarakat yang religius dan multikultural seperti Indonesia.

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan tafsir politik dan hubungannya dengan agama. Penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber yang berhubungan dengan tafsir politik dan agama.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan mencari berbagai sumber yang relevan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005 di dalam Nasution, 2023). Dengan pendekatan berbasis kepustakaan atau studi pustaka, yang berarti mengumpulkan data dari kepustakaan (buku, jurnal, artikel, dan dokumen pribadi.), membaca dan mencatatnya untuk mengklasifikasi, menganalisis penelitian, mengolah bahan penelitian, membuat kesimpulan dan laporan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI merupakan suatu pemberontakan dengan menculik dan membunuh para perwira Jendral angkatan darat. Peristiwa Sumur Lubang Buaya merupakan tindak lanjut dari peristiwa Gestapu 1965 yang dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai kudeta sebagai atau rampasan kuasa pada tanggal 30 September 1965, G30S/PKI (Rohani Ghani & Tajuddin, 2017, #). Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 menjadi salah satu peristiwa gelap yang pernah terjadi di Indonesia. Menyusul dari peristiwa G30S/PKI, militer dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan militernya dan mendorong kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat anti komunis kemudian organisasi agama untuk bergerak menumpas PKI. Awal mula berdirinya PKI berasal dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Dilansir dari esi.kemdikbud.go.id tujuan dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging adalah menyebarkan paham Marxisme, secara singkat paham Marxisme adalah teori sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuan menghapus ketimpangan kelas melalui penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Nana Supriatna, dalam Kristina, 2021 menuliskan jika anggota dari ISDV ini diam-diam masuk ke

dalam berbagai partai-partai di Indonesia yang ada pada saat itu. Tokoh seperti Semaoen dan Darsono yang merupakan anggota Sarekat Islam sangat berperan penting dalam pendirian PKI. Dalam mewujudkan tujuan PKI adalah mendirikan masyarakat komunis di Indonesia dengan menghapus kapitalisme dan kelas sosial demi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat, beberapa perwira tinggi TNI menjadi korban antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Peristiwa G30S/PKI memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologi sosial masyarakat Indonesia secara umum. Masyarakat Indonesia mengalami stres, cemas, dan depresi akibat dari keadaan politik yang tidak stabil pada periode tersebut.

Selain dampak psikologis, peristiwa ini juga menimbulkan ketegangan sosial yang luar biasa di berbagai daerah di Indonesia. Munculnya rasa saling curiga antar kelompok masyarakat menyebabkan disintegrasi sosial yang mengakar, bahkan menimbulkan konflik horizontal di sejumlah wilayah. Pemerintah Orde Baru kemudian memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat kekuasaannya dengan membentuk narasi tunggal mengenai bahaya laten komunisme, yang terus digemakan melalui kurikulum pendidikan, media massa, dan simbol-simbol nasionalisme. Narasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghapus pengaruh PKI, tetapi juga menjadi alat legitimasi politik untuk menekan oposisi yang dianggap mengancam stabilitas negara. Akibatnya, stigmatisasi terhadap orang-orang yang dituduh terlibat atau berafiliasi dengan komunisme berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka.

Ideologi komunis masuk ke Indonesia 1913, diperkenalkan oleh Endericus Josephus Franciscus Maria Sneevliet mantan ketua Sekretariat Buruh Nasional dan mantan pemimpin partai Revolusioner Sosialis disalah satu provinsi di negara Belanda (Abdul Ghofur, n.d., #).

Sneevliet kemudian mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI). ISDV aktif menyebarkan ideologi Marxisme kepada kaum buruh dan prajurit Hindia Belanda, terutama di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya. Pengaruh ideologi komunis semakin meluas melalui propaganda di media cetak dan pembentukan serikat buruh, serta menyusup ke organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tokoh-tokoh Islam dan nasionalis karena ajaran komunisme yang bersifat ateis dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa Indonesia.

Dalam peristiwa PKI ini, menurut Munchor UMY, 2023 Muhammadiyah menolak komunisme karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang memiliki pandangan jika kepemilikan pribadi merupakan hak yang dijamin oleh ajaran Islam. Dikutip dari Masjid Jami' Al-Qodar Tunjung Putih secara garis besar tauhid berhubungan dengan persoalan yang berhubungan dengan Allah SWT, rasul-rasul-Nya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia setelah mati. Selain itu, menurut Nurfajrina, 2023 pedoman hidup manusia dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam salah satu surat yaitu, Surat Ali Imran ayat 104 yang bertulis “وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرَ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ ۖ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَأُولَٰئِكَ ۖ الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَٰئِكَ ۖ الْمُفْلِحُونَ” (Waltakum minkum ummatuy yad'ūna ilal-khairi wa ya'murūna bil-ma'rūfi wa yanhauna 'anil-munkar(i), wa ulā'ika humul-muflihūn(a)) yang berarti, “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Maka dari itu, Muhammadiyah juga mengajarkan ajaran Islam agar para masyarakat tahan terhadap pengaruh ideologi komunis.

Selain mengajarkan pentingnya ketauhidan dan akhlak mulia, Muhammadiyah juga secara aktif membentuk pola pikir kritis masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Penolakan terhadap komunisme tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga

diwujudkan dalam bentuk pembinaan umat agar memiliki ketahanan spiritual, intelektual, dan sosial. Dengan memperkuat pemahaman terhadap Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin, Muhammadiyah berupaya mencegah lahirnya generasi yang mudah terpengaruh oleh paham-paham menyimpang yang merusak tatanan moral, agama, dan negara. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Muhammadiyah dalam menjaga keutuhan NKRI dan menanamkan semangat amar ma'ruf nahi munkar di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, aksi 212 merupakan aksi untuk mengkritik pemerintah. Aksi 212 ini berawal pada kunjungan Basuki Tjahaja Purnama ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Ahok menyampaikan isi Surat Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim" (Basuki Tjahaja Purnama, 2020). Ahok menyampaikan pendapatnya karena ia berasumsi ada banyak oknum yang menggunakan isi Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menggiring masyarakat agar tidak memilihnya dalam pemilu berikutnya. Namun, aksinya ini menimbulkan keributan massa pada 2 Desember 2016 di depan Monumen Nasional dan akhirnya pada bulan Mei 2017 ia dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. memasuki Kepulauan Seribu, sudah ada sentimen negatif terhadap pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, terutama karena ia bukan Muslim dan Tionghoa. Beberapa kebijakan Ahok juga dianggap sebagai tanda keislaman di Jakarta. Pernyataan tentang Al-Maidah 51 adalah sebuah tulisan sepotong tulisan mencerminkan sentimen ini dan menggambarkan opini publik. Selain itu platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp mendukung peran krusial dalam menyebarkan informasi, mengembangkan strategi, dan melibatkan massa. Menyediakan organisasi Islam sebuah platform di media sosial untuk

mengekspresikan solidaritas dan memobilisasi masyarakat. Pasca Aksi 212 dan Perkembangan Kasus Ahok. Setelah Aksi 212 selesai, PA 212 menyelenggarakan "Reuni Akbar 212" pada tanggal 2 Desember 2017 di Monas. Tujuan dari acara ini merupakan agenda tahunan. Kini, Reuni 212 menjadi agenda tahunan.

Setelah aksi 212 dan kasus Ahok, dinamika hubungan antara agama dan politik di Indonesia mengalami eskalasi signifikan. Aksi tersebut bukan sekadar bentuk protes terhadap pernyataan seorang pejabat, melainkan telah berkembang menjadi simbol perlawanan politik berbasis identitas keagamaan. Reuni 212, yang diadakan secara tahunan sejak 2017, memperlihatkan bahwa gerakan ini tidak serta-merta berhenti setelah kasus Ahok berakhir. Sebaliknya, ia menjelma menjadi forum konsolidasi kekuatan politik Islam konservatif di Indonesia. Dalam konteks ini, agama tidak lagi sekadar menjadi instrumen spiritual, tetapi menjadi alat mobilisasi sosial dan politik yang efektif.

Kegiatan Reuni 212 juga menunjukkan bagaimana isu keagamaan dapat dikelola secara strategis untuk membangun narasi politik tertentu. Narasi tersebut mencakup klaim representasi umat Islam, seruan moral terhadap pemimpin politik, serta tuntutan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak mewakili nilai-nilai Islam. Melalui simbol-simbol keagamaan, seperti pemakaian busana Muslim, lantunan zikir, dan pengibaran panji bertuliskan kalimat tauhid, gerakan ini menampilkan identitas kolektif yang kuat. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah atau mendukung tokoh-tokoh politik tertentu yang dianggap sejalan dengan aspirasi mereka.

Peran media sosial semakin memperkuat dampak gerakan ini. Platform seperti Twitter dan Facebook menjadi saluran utama dalam penyebaran opini, dokumentasi aksi, serta ajakan kepada masyarakat untuk bergabung dalam reuni maupun aksi lanjutan. Bahkan, media sosial memungkinkan gerakan ini menjangkau khalayak lebih luas, termasuk masyarakat di daerah yang tidak terlibat langsung dalam aksi. Dalam hal ini, teknologi informasi berperan sebagai medium efektif

dalam menciptakan kesadaran kolektif dan memperkuat solidaritas berbasis agama.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Ketika tafsir agama digunakan secara selektif untuk menyerang kelompok tertentu atau mendiskreditkan pemimpin yang berbeda agama atau etnis, maka ruang publik yang seharusnya inklusif menjadi terpolarisasi. Hal ini memperlihatkan bagaimana agama bisa dijadikan alat untuk mempertajam batas identitas sosial dan politik, yang pada akhirnya dapat merusak kohesi sosial bangsa.

Selain itu, keterlibatan organisasi-organisasi Islam dalam aksi dan reuni 212 menunjukkan adanya upaya pembentukan kekuatan politik alternatif yang berbasis keagamaan. Beberapa tokoh dari gerakan ini kemudian mencalonkan diri atau memberikan dukungan politik dalam pemilu. Artinya, pengaruh aksi 212 tidak berhenti pada ranah sosial, melainkan meluas ke struktur politik formal. Inilah yang membuat aksi 212 dan Reuni 212 layak dikaji secara serius sebagai representasi dari fenomena tafsir politik terhadap agama yang berakar dalam konteks kekuasaan, identitas, dan representasi publik di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Gerakan 30 September 1965 oleh PKI merupakan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang berakar dari penyebaran paham Marxisme oleh ISDV, dengan tujuan membentuk masyarakat tanpa kelas dan menghapus kepemilikan pribadi. Ideologi ini ditolak oleh Muhammadiyah karena bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya prinsip tauhid dan hak milik, serta diperkuat dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar untuk membentengi umat dari komunisme. Sementara itu, Aksi 212 pada tahun 2016 menunjukkan bagaimana tafsir agama juga dapat digunakan sebagai kekuatan politik, ketika umat Islam memprotes pernyataan Gubernur Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51.

Kedua peristiwa ini, meskipun berbeda dalam konteks dan waktu, sama-sama menunjukkan bagaimana ideologi baik yang berbasis sekuler seperti komunisme maupun yang berbasis agama dapat menjadi

alat mobilisasi massa dan sarana perebutan kekuasaan. Dalam kasus PKI, ideologi komunisme menjadi ancaman terhadap tatanan religius dan nasional, sedangkan dalam kasus Aksi 212, tafsir agama dimanfaatkan untuk menekan kekuasaan yang dianggap menyinggung sentimen keagamaan mayoritas. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, politik dan agama senantiasa beririsan, dan tafsir terhadap ajaran tertentu sering kali dipolitisasi sesuai dengan kepentingan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk terus membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah, baik atas nama ideologi maupun agama.

Saran

Peristiwa kelam seperti Gerakan 30 September 1965 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ideologi yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat pendidikan ideologi, sejarah, serta pemahaman agama yang moderat agar tidak mudah terprovokasi atau terpecah oleh paham-paham radikal, baik yang bersifat ekstrem kiri seperti komunisme maupun ekstrem kanan yang mempolitisasi agama. Organisasi Muhammadiyah juga diharapkan terus berperan aktif dalam membina umat melalui nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar, guna menciptakan masyarakat yang harmonis, kritis, namun tetap beradab dalam menyikapi perbedaan dan persoalan politik.

Selain itu, peran tokoh agama, pendidik, dan intelektual Muslim sangat penting dalam menyuarakan tafsir-tafsir keagamaan yang inklusif dan kontekstual, agar agama tidak dijadikan alat justifikasi untuk kekerasan atau ambisi kekuasaan. Mereka perlu menjadi garda terdepan dalam menangkal narasi intoleransi yang mengatasnamakan agama, serta membangun kesadaran kolektif bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, bukan ancaman. Dengan demikian, semangat kebangsaan dan keagamaan dapat berjalan seiring, menciptakan ruang publik yang sehat, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Ghofur. (n.d.). PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. PERAN SOEHARTO DALAM PERISTIWA G 30 S/PKI. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/6033/1/ABDUL%20GHOFUR-FISIP.pdf>

Arbi, I. A., & Asril, S. (2020, Desember 2). Mengenal Reuni 212, dari Aksi Melawan Ahok hingga Kriitik Pemerintah. Retrieved Mei 18, 2025, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/02/17531761/mengenal-reuni-212-dari-aksi-melawan-ahok-hingga-kriitik-pemerintah?page=all>

Arbi, I. A., & Asril, S. (2020, Desember 2). Mengenal Reuni 212, dari Aksi Melawan Ahok hingga Kriitik Pemerintah Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Reuni 212, dari Aksi Melawan Ahok hingga Kriitik Pemerintah", Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/02/17531761/mengenal-reuni-212-dari-aksi-melawan-ahok-hingga-kriitik-pemerintah> Retrieved Juni 2, 2025, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/02/17531761/mengenal-reuni-212-dari-aksi-melawan-ahok-hingga-kriitik-pemerintah>

Azkiah, N., Aziz2, M. A., & Muhyi, A. A. (2024, Juni 26). LEMBAGA NEGARA DAN PERGULATAN SEJARAH (ANALISIS TAFSIR MAUDHU'I). An Najah Jurnal pendidikan islam dan sosial keagamaan, 34. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/321/204>

Kristina. (2021, September 30). G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya Baca artikel detikedu, "G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5747435/g30s-pki-sejarah-tujuan-kronologi-dan-latar-belaka>. Retrieved Mei 18, 2025, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5747435/g30s-pki-sejarah-tujuan-kronologi-dan-latar-belakangnya>

kumparanNEWS. (2019, Juli 31). Apa Itu Marxisme yang Diperbolehkan Menristekdikti untuk Dikaji? Retrieved Mei 18, 2025, from

<https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-marxisme-yang-diperbolehkan-menristekdikti-untuk-dikaji-1rZkm8V5Htq>

Nasution, A. F. (Januari 2023). metode penelitian kualitatif. Abdul Fattah (Vol. 184). CV. Harfa Creative. <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>

Nurfajrina, A. (2023, Maret 16). Surat Ali Imran Ayat 104, Penyeru Amar Ma'ruf Nahi Munkar Adalah yang Beruntung. Retrieved Mei 18, 2025, from <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6622840/surat-ali-imran-ayat-104-penyeru-amar-maruf-nahi-munkar-adalah-yang-beruntung>

Rohani Ghani, & Tajuddin, M. S. (2017, Desember). Journal of Nusantara Studies. G30S/PKI 1965 DAN TRAGEDI LUBANG BUAYA: SEBUAH TRILOGI [TRAGEDI G30S/PKI 1965 DAN LUBANG BUAYA: SUATU TRILOGI], 2(2), 295-305. <https://journal.unisza.edu.my/jonus/index.php/jonus/article/view/172>

UMY, M. (2023, September 30). Muhammadiyah: Benteng Kebangsaan dan Perlawanan Terhadap Ideologi Komunis. Retrieved Mei 18, 2025, from <https://muhcor.umy.ac.id/muhammadiyah-benteng-kebangsaan-dan-perlawanan-terhadap-ideologi-komunis/>

Zulaiha, E., Agustin, K. F., & Rahman, N. A. (2022, April 27). Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi). Hanifiya: Jurnal studi-studi agama, 5(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/hanifiya/article/view/15538/7086>